



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KATARINA INDAH SULASTUTI
2. Jabatan : SEKRETARIS JURUSAN TARI
3. NIK : 428786

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 545.680.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m²/21 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/21 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 2196 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 175.680.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA LEXY B3F-I A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 592.919.270

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.298.599.270

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.298.599.270

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.